

KAJIAN DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH PESISIR DI PROVINSI BENGKULU

THE IMPACT OF REGIONAL ON LARGE TO ECONOMIC PERFORMANCE OF COASTAL REGION IN BENGKULU PROVINCE

Nyayu Neti Arianti dan Indra Cahyadinata
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNIB

ABSTRACT

The aims of this research were to analyze the impact of ECGI, WELFI, POVEI are used to regional divisions on coastal regions in Bengkulu Province to 1) economic performances before and after the divisions, and 2) economic performances of Core Region, New Autonomus Region, and both after the divisions. The results of this research : 1) the differential t test analyses of economic performance indicators in coastal region of Bengkulu Province showed that the economic growth before and after the divisions were not different, the GDP per capita after the divisions was higher than before, and the poverty indexes were same between before and after the divisions, and 2) the economic performance after the divisions of coastal region in Bengkulu Province could be explained that the economic growth of the Core Region was the highest and stable whereas the economic growth of the New Autonomus Region was the lowest and tend to unstable, the highest GDP per capita was ocured on the Core Region and the lowest one was on the New Autonomus Region, while the lowest poverty index was on the Core Region and the highest one was on the New Autonomus Region.

Keywords : *impact, regional divisions, economic performance, coastal region*

PENDAHULUAN

Mengiringi dinamika politik yang berkembang sejak awal era reformasi khususnya berkaitan dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk daerah otonom baru. Pemerintah menerbitkan PP nomor 129 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah yang mengatur antara lain tentang instrumen prosedural dan instrumen persyaratan pemekaran daerah. Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah pemekaran wilayah administratif, pada tahun 2004, pemerintahan provinsi telah bertambah dari 26 menjadi 33 (26,9%), sedangkan pemerintah kabupaten/kota meningkat 45,2%, dari 303 menjadi 440 (Ajdao, 2012).

Namun menurut Handoko (2008) apakah sepenuhnya otonomi daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan mendekatkan pelayanan kepada rakyat itu berlangsung dengan baik untuk menghilangkan sekat-sekat atau jurang-jurang ketidakmakmuran dan jurang perbedaan antara segelintir kaum kaya dengan kaum miskin-papa, terutama yang ada di daerah-daerah otonom? Ternyata selama perjalanannya, otonomi daerah sebagai solusi untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan tidak terlalu signifikan menunjukkan perbaikan taraf kehidupan masyarakat.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 dengan luas 19.813 km² letaknya memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 km. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km. Pada awal pembentukannya Provinsi Bengkulu terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (Witrianto,2013). Tiga dari empat daerah Tingkat II tersebut berada di sepanjang pesisir, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu.

Sejak tahun 2003 Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah. Saat ini terdapat enam kabupaten baru (Daerah Otonom Baru, DOB) yang merupakan hasil pemekaran dari tiga kabupaten sebelumnya (Anonim, 2009), yaitu : (1) Kabupaten Mukomuko, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Kabupaten Seluma, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, (3) Kabupaten Kaur, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, (4) Kabupaten Kepahiang, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, (5) Kabupaten Lebong, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dan (6) Kabupaten Bengkulu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 24 Juni 2008.

Kegiatan pemekaran wilayah-wilayah kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Konsekuensi dari pemekaran itu adalah terdapat Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar, dimana Daerah Mekar adalah gabungan antara Daerah Induk dan DOB. Pembentukan DOB dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sehingga dengan adanya pemekaran wilayah, aspek-aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi diharapkan akan menjadi lebih baik dan merata. Pada Tabel 1 tertera Daerah Tingkat II di Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran tahun 2003. Daerah Tingkat II Kota Bengkulu tidak mengalami pemekaran.

Tabel 1. Daerah-daerah Pesisir dan Non Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran

Daerah Induk	Pesisir		Non Pesisir		
	DOB	Daerah Mekar	Daerah Induk	DOB	Daerah Mekar
Bengkulu Utara	Mukomuko Bengkulu Tengah	Bengkulu Utara Bengkulu Selatan Mukomuko Bengkulu Tengah	Rejang Lebong	Kepahiang Lebong	Rejang Lebong Kepahiang Lebong
Bengkulu Selatan	Seluma Kaur	Seluma Kaur			

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana dampak pemekaran wilayah yang terjadi terhadap kinerja ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu?

Dengan demikian dapat dirumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap : (a) Kinerja ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah, dan (b) Kinerja ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar pesisir setelah pemekaran .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bengkulu karena merupakan salah satu provinsi yang daerah-daerah kabupatennya mengalami pemekaran pada Tahun 2003 dan sebagian besar yang mengalami pemekaran tersebut adalah daerah pesisir. Dampak pemekaran di provinsi ini belum pernah dikaji. Penelitian dilakukan dari bulan Juni sampai Nopember 2013.

Data yang digunakan adalah data-data sekunder yang tersedia di BPS Provinsi Bengkulu, yaitu data PDRB atas Dasar Harga Konstan, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan (*head-count index*) baik data untuk masing-masing Daerah Induk (Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan), DOB yaitu Kabupaten Mukomuko (pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara) serta Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara), dan Daerah Mekar yang meliputi seluruh Daerah Induk dan DOB. Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan DOB untuk Kabupaten Bengkulu Utara tidak diteliti karena baru terbentuk tahun 2008. Data penelitian meliputi data sebelum pemekaran (1993, 1994-2002) dan setelah pemekaran (tahun 2003-2011). Namun ada beberapa data-data deret waktu tersebut yang tidak tersedia, sehingga untuk memperlancar analisis data digunakan data deret waktu yang lengkap tersedia.

Analisis Dampak Pemekaran Daerah Pesisir

Dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian pertama dan kedua dilakukan analisis kinerja ekonomi daerah. Menurut Tambunan (2003), Widodo (2006), Darmawan dkk (2008) dan Ajdaoke (2012) indikator-indikator kinerja ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah adalah :

Pertumbuhan PDRB Non-migas (ECGI)

Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan.

$$ECGI_{i,t} = \frac{YNM_{i,t} - YNM_{i,t-1}}{YNM_{i,t-1}} \times 100\%$$

dimana, YNM adalah PDRB non migas i adalah kabupaten/kota ke- I , dan t adalah tahun ke- t

PDRB per Kapita (WELFI)

Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

$$WELFI_{i,t} = \frac{Y_{i,t}}{f_{i,t}}$$

dimana, Y : PDRB dan f : jumlah penduduk

Angka Kemiskinan (POVEI)

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan *head-count index*, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk.

$$POVEI_{i,t} = \frac{Q_{i,t}}{P_{i,t}} \times 100\%$$

dimana, Q = jumlah penduduk miskin

Kinerja Ekonomi Wilayah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

Perbedaan kinerja ekonomi daerah pesisir antara sebelum dan setelah pemekaran dianalisis dengan Uji beda t untuk setiap indikator kinerja ekonomi daerah tersebut di atas pada taraf kepercayaan 95%.

Kinerja Ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar Pesisir Setelah Pemekaran Wilayah

Untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua dilakukan dengan menganalisis perkembangan indikator-indikator kinerja ekonomi setelah pemekaran. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut akan dibandingkan antara Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar (Darmawan dkk, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kinerja Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB adalah indikator pertumbuhan ekonomi yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Indikator kinerja ekonomi daerah yang pertama dianalisis adalah Pertumbuhan PDRB. Data PDRB daerah pesisir yang digunakan adalah data PDRB atas Harga Konstan. Data sebelum pemekaran wilayah (tahun 1993 sampai 2000) meliputi dua daerah pesisir yakni Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Bengkulu Utara. Sementara data PDRB setelah pemekaran wilayah (tahun 2004 sampai 2011) meliputi lima daerah pesisir yang disebut Daerah Mekar yaitu Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Mukomuko sebagai DOB serta Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Bengkulu Utara sebagai Daerah Inti.

Pertumbuhan PDRB dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang tertera dalam metode penelitian. Rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

Sebelum Pemekaran Wilayah		Setelah Pemekaran Wilayah	
Tahun	Rata-rata Petumb. PDRB (%)	Tahun	Rata-rata Pertumb. PDRB (%)
1994	8,06	2005	10,66
1995	12,25	2006	5,51
1996	5,11	2007	5,25
1997	-1,04	2008	-1,99
1998	-1,46	2009	4,52
1999	1,60	2010	6,80
2000	3,83	2011	6,24
Rerata	4,05	Rerata	5,28

Sumber : Data Diolah, 2013.

Walaupun rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah lebih rendah dibanding setelah pemekaran wilayah, namun hasil analisis uji beda rata-rata menunjukkan bahwa nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar -0,52. Sedang nilai t tabel (0,025;12) adalah 2,179. Dengan demikian nilai t hitung tersebut berada di antara nilai - t tabel dan nilai t tabel, maka H_0 diterima yang artinya rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir di Provinsi Bengkulu sebelum mengalami pemekaran tidak berbeda dengan setelah pemekaran wilayah.

Rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah cenderung fluktuatif rata-rata sebesar 4,05%/tahun. Pada tahun 1997 dan 1998 pertumbuhan PDRB menurun menjadi negatif akibat krisis ekonomi. Setelah pemekaran wilayah pertumbuhan PDRB cenderung meningkat dengan rata-rata 5,28%/tahun. Namun pada tahun 2008 mengalami penurunan dengan angka pertumbuhan yang negatif. Hal ini terjadi karena nilai pertumbuhan yang negatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Penyebabnya adalah pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang semula terdiri dari 18 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Pada Tahun 2009, PDRB Kab. Bengkulu Utara berdasarkan harga konstan Tahun 2000 sebesar Rp. 766.582.590,-.

PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita dihitung dengan cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah. Rata-rata PDRB per kapita daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah tertera dalam Tabel 3.

Rata-rata PDRB per kapita daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan PDRB per kapita sebelum pemekaran rata-rata hanya 4,46% per tahun sementara setelah pemekaran wilayah peningkatannya sebesar 8,50% per tahun.

Tabel 3. Rata-rata PDRB per Kapita Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

Sebelum Pemekaran Wilayah		Setelah Pemekaran Wilayah	
Tahun	Rata-rata PDRB/kapita (Rp)	Tahun	Rata-rata PDRB/kapita (Rp)
1994	893.175,63	2004	1.860.497,23
1994	1.203.220,50	2005	2.552.642,79
1995	1.130.099,00	2006	2.715.681,49
1996	1.108.174,00	2007	2.764.819,10
1997	1.031.502,50	2008	2.643.105,92
1998	1.020.473,50	2009	2.876.746,36
1999	1.031.049,50	2010	3.041.784,15
2000	1.149.214,00	2011	3.160.282,57
Rerata	1.070.863,58	Rerata	2.701.944,95

Sumber : Data Diolah, 2013.

Rata-rata pendapatan per kapita daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah sebesar Rp 1.070.863,58 meningkat menjadi Rp 2.701.944,95 setelah pemekaran wilayah. Namun pendapatan per kapita daerah pesisir ini masih sangat rendah dibanding pendapatan per kapita Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp 5.100.000 pada tahun 2011 (Noviansa, 2013). Hal ini terjadi karena daerah pesisir yang menjadi objek penelitian adalah daerah-daerah yang PDRB nya didominasi oleh sumbangan sektor primer seperti sektor pertanian yang bernilai rendah.

Namun jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran wilayah, tingkat pendapatan per kapita setelah pemekaran lebih tinggi. Artinya tingkat kesejahteraan penduduk meningkat setelah pemekaran wilayah dilakukan. Hal ini didukung oleh hasil analisis beda rata-rata PDRB per kapita daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah yang menunjukkan bahwa nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar -11,33. Nilai t hitung (-11,33) lebih kecil dari nilai -t tabel (0,025;14) (-2,145). Jadi terima H_a , artinya rata-rata PDRB per kapita daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah tidak sama dengan rata-rata PDRB per kapita setelah pemekaran wilayah, dimana rata-rata PDRB per kapita sebelum pemekaran wilayah lebih rendah dibanding setelah pemekaran wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pesisir di Provinsi Bengkulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khalid (2012) bahwa dengan dibentuknya DOB maka terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonomi dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah DOB juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah DOB. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Sementara itu Daerah Inti semakin mampu memperkuat perekonomian karena sumberdaya alam dan manusia produktif yang terkonsentrasi di daerah ini. Sumbangan sektor selain pertanian yang umumnya berkembang yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran semakin berkembang mengiringi sumbangan sektor pertanian yang semakin menurun.

Angka Kemiskinan

Rata-rata angka kemiskinan sebelum dan setelah pemekaran disajikan dalam Tabel 4. Angka kemiskinan relatif hampir sama yakni sebesar 26,01% saat sebelum pemekaran dan 26,20% setelah pemekaran dilakukan.

Tabel 4. Rata-rata Angka Kemiskinan Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

Sebelum Pemekaran Wilayah		Setelah Pemekaran Wilayah	
Tahun	Rerata Angka Kemiskinan (%)	Tahun	Rerata Angka Kemiskinan(%)
2000	22,85	2005	31,10
2002	29,17	2006	31,73
		2007	30,50
		2008	31,27
		2009	21,81
		2010	18,48
		2011	18,51
Rerata	26,01	Rerata	26,20

Sumber : Data Diolah, 2013.

Rata-rata angka kemiskinan di daerah pesisir ini jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan provinsi. Pada kurun waktu tahun 2000-2002 (sebelum pemekaran) rata-rata angka kemiskinan provinsi sebesar 20,04% dan

setelah pemekaran sebesar 20,45%. Tingkat kemiskinan penduduk di daerah pesisir umumnya memang lebih tinggi. Menurut Ani (2009) 60% penduduk miskin Indonesia berada di daerah pesisir. Begitu pula dengan Provinsi Bengkulu, sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di daerah pesisir. Kondisi ini disebabkan oleh karena umumnya masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan yang berpendapatan rendah dengan resiko dan ketidakpastian pekerjaan yang tinggi.

Namun, hasil uji beda rata-rata untuk indikator angka kemiskinan menunjukkan bahwa angka kemiskinan daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah sama atau tidak berbeda dengan setelah pemekaran wilayah. Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah -0,04 sementara nilai t_{tabel} (0,025;7) adalah 2,365. Nilai t_{hitung} berada di antara nilai $-t_{tabel}$ dan t_{tabel} sehingga H_0 diterima.

Hasil analisis tentang angka kemiskinan yang tidak berbeda antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ani (2009) bahwa jumlah penduduk miskin pesisir sejak tahun 2005 tidak berkurang. Penyebabnya adalah sekitar 90% kegiatan perikanan dilakukan secara tradisional yang minim info dan pengetahuan, kekurangan moda transportasi laut, pengelolaan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang buruk. Sebagian besar nelayan menangkap ikan jauhnya kurang dari 3 mil dengan alat yang minim sehingga pendapatan merekapun minim. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rata-rata PDRB per kapita masyarakat daerah pesisir di Provinsi Bengkulu baik sebelum maupun setelah pemekaran wilayah masih sangat rendah dibanding PDRB per kapita provinsi. Sebelum pemekaran hanya sebesar Rp 1.070.863,58 dan setelah pemekaran hanya Rp 2.701.944,95.

Kinerja Ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar Pesisir di Provinsi Bengkulu Setelah Pemekaran Wilayah

Pertumbuhan PDRB

Menurut Darmawan dkk (2008) pertumbuhan ekonomi menunjukkan gerak berbagai sektor pembangunan dan merupakan juga sumber penciptaan lapangan kerja. Adanya peningkatan nilai tambah di perekonomian mengisyaratkan peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya internal di daerah yang bersangkutan, maupun dalam kaitannya dengan interaksi antar daerah.

Rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir di Provinsi Bengkulu setelah dilakukannya pemekaran wilayah dapat dilihat pada Tabel 5. Rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar -11,95 yang disebabkan oleh pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2008 tersebut yang bernilai -28,75, sementara daerah-daerah lain mengalami pertumbuhan PDRB

yang bernilai positif dan relatif stabil. Rata-rata pertumbuhan DOB dan Daerah Mekar juga sangat tinggi pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan PDRB Kabupaten Kaur yang mencapai 30,55% pada tahun tersebut.

Tabel 5. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Setelah Pemekaran Wilayah

Tahun	Rerata Pertumbuhan PDRB (%)		
	Daerah Inti	DOB	Daerah Mekar
2005	5,52	14,09	10,66
2006	6,13	5,10	5,51
2007	5,82	4,87	5,25
2008	-11,95	4,64	-1,99
2009	4,99	4,21	4,52
2010	5,61	7,59	6,80
2011	6,33	6,18	6,24
Rerata	3,21	6,67	5,28

Sumber : Data Diolah, 2013.

Untuk itu, agar nilai rata-rata pertumbuhan PDRB tidak “dirusak” oleh data tahun 2005 dan 2008 yang terlalu mencolok, maka data-data tersebut dikeluarkan dari penghitungan nilai rata-rata (Tabel 6).

Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2005 sampai 2011 yang sebesar 5,73% per tahun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012), maka rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir di Provinsi Bengkulu ini relatif baik karena sama dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 6. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun 2006 sampai 2011 (Data Tahun 2008 Dikeluarkan)

Tahun	Rerata Pertumbuhan PDRB (%)		
	Daerah Inti	DOB	Daerah Mekar
2006	6,13	5,10	5,51
2007	5,82	4,87	5,25
2009	4,99	4,21	4,52
2010	5,61	7,59	6,80
2011	6,33	6,18	6,24
Rerata	5,78	5,59	5,66

Sumber : Data Diolah, 2013.

Setelah dilakukan perbaikan penghitungan maka diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Daerah Inti adalah yang paling tinggi (5,78% per tahun) dibanding DOB (5,59% per tahun) dan Daerah Mekar (5,66% per tahun). Ketiga daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Darmawan dkk (2008) menyatakan bahwa suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jika angka pertumbuhannya antara 5% sampai 6% per tahun.

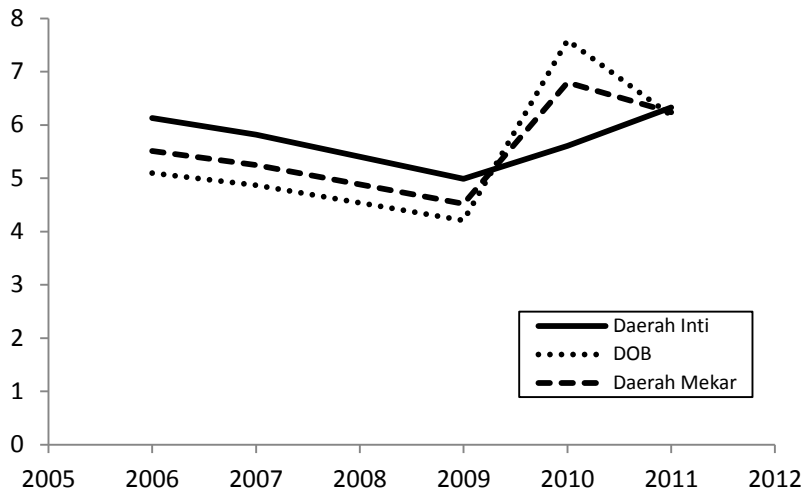
Pertumbuhan ekonomi Daerah Inti paling tinggi dibanding DOB dan Daerah Mekar, karena Daerah Inti sudah mapan secara ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di DOB lebih rendah dan bersifat fluktuatif dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Daerah Induk. Hasil penelitian Abdullah (2011) juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa lebih rendah dibanding Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi Daerah Induknya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Darmawan dkk (2008) dimana laju pertumbuhan ekonomi di Daerah Inti lebih stabil sementara di DOB cenderung fluktuatif. Fluktuasi tersebut antara lain disebabkan oleh dominannya sektor pertanian sebagai komponen terbesar dalam perekonomian DOB. Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan harga, pergantian musim maupun iklim. Akibatnya perubahan sedikit saja pada komponen tersebut akan sangat berpengaruh pada pembentukan PDRB.

Menurut BPS Provinsi Bengkulu (2013) kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir (2008-2012) selalu mengalami pertumbuhan terutama pada tahun 2012 dimana perekonomian mengalami pertumbuhan tertinggi dan tahun 2008 terendah selama dekade tersebut. Hal ini juga tampaknya terjadi di daerah pesisir Provinsi Bengkulu yang mendominasi wilayah provinsi (Gambar 1). Krisis global yang terjadi pada akhir tahun 2008 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun tetapi meningkat lagi di tahun 2009.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Ajdaoike (2012) dimana kondisi DOB secara umum masih berada di bawah kondisi Daerah Induk. Pertumbuhan ekonomi DOB lebih fluktuatif dibandingkan dengan Daerah Induk yang relatif stabil dan terus meningkat.

Daerah Inti daerah pesisir Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang relatif stabil karena ditunjang oleh sektor selain pertanian. Sejak sebelum pemekaran, Daerah Inti sudah mengalami pembangunan ekonomi yang lebih baik. Sektor-sektor ekonomi selain pertanian sudah lebih berkembang seiring dengan penambahan waktu seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Hal ini dapat dilihat dari data-data berikut: PDRB Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 36% dari total PDRB. Posisi kedua adalah sektor jasa-jasa

(17%) dan posisi ketiga adalah sektor pertambangan dan penggalian (14%) (Adm. Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara, 2011).



Gambar 1.
Perkembangan Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun 2006 sampai 2011 (dalam %)

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (2011) menyatakan bahwa PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan memang masih didominasi oleh sektor pertanian dengan sumbangan sebesar 31,84% pada tahun 2009. Namun diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (26,32%) dan sektor jasa-jasa (22,01%).

DOB daerah pesisir Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Seluma, Kabupaten kaur dan Kabupaten Mukomuko. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB DOB lebih tinggi dibanding terhadap PDRB Daerah Inti. Hal ini wajar terjadi pada daerah yang baru terbentuk. Sektor primer tentu saja menjadi andalan dalam perekonomian. Sebelum pemekaran wilayah dilakukan, DOB umumnya merupakan wilayah plasma dari Daerah Inti. Sebagai daerah plasma DOB ini menjadi penghasil komoditi pertanian. Maka wajar saja jika setelah pemekaran wilayah dilakukan, sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB.

Menurut *Indonesian Investment Coordinating Board* (2012b) pada tahun 2010 sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Seluma atas harga konstan, yaitu sebesar 53,50%. Sektor berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,74% dan sektor jasa-jasa sebesar 12,71%. Berdasarkan data dari *Indonesian Investment Coordinating Board* (2012a) pada tahun 2011, sama dengan DOB lain, Kabupaten

Mukomuko juga memiliki PDRB dimana sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar yaitu 41,21% dengan laju pertumbuhan tertinggi pula dibanding sektor-sektor lain. Lalu diikuti juga oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (16,46%). Namun dibanding DOB yang lain di Kabupaten Mukomuko sektor industri pengolahan menyumbang 13,89% dari PDRB kabupaten.

Besaran kontribusi sektor dominan mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. DOB yang memiliki sumbangan sektor pertanian tertinggi yaitu Kabupaten Seluma mempunyai pendapatan per kapita paling rendah yaitu sebesar Rp 1.886.967,29. Sementara itu kontribusi sektor industri yang paling besar yaitu di Kabupaten Mukomuko berdampak pula pada pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Mukomuko paling tinggi dibanding DOB lain yakni rata-rata sebesar Rp 3.588.731,45. Hal ini mencerminkan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi suatu daerah, sumbangan sektor pertanian masih tinggi. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang ditandai oleh meningkatnya sumbangan sektor industri, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai *leading sector* di DOB, sektor pertanian sangat rentan terhadap gejolak harga, baik harga komoditi maupun hal-hal lain yang secara teknis mempengaruhi nilai tambah sektor pertanian. Oleh karena itu, kemajuan perekonomian DOB sangat tergantung pada usaha pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor tersebut. Porsi perekonomian daerah DOB yang lebih kecil dibandingkan daerah lain dalam perekonomian satu wilayah (provinsi) mengindikasikan, bahwa secara relatif daerah DOB belum memiliki peran dalam pengembangan perekonomian regional (Ajdaoke, 2012).

Selanjutnya menurut Ajdaoke (2012) hal-hal yang diduga menjadi penyebabnya antara lain adalah Pertama, pembagian sumber-sumber perekonomian antara daerah DOB dan Daerah Induk tidak merata. Daerah induk biasanya mendominasi pembagian sumber daya ekonomi seperti kawasan industri maupun sumber daya alam produktif. Kedua, investasi swasta di DOB juga relatif kecil sehingga tidak banyak terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk mendongkrak perekonomian daerah. Ketiga, perekonomian di DOB belum digerakkan secara optimal oleh pemerintah daerah, baik karena kurang efektifnya program-program yang dijalankan, maupun karena alokasi anggaran pemerintah yang belum optimal.

Pendapatan per Kapita

PDRB per kapita adalah indikator makro yang secara agregat dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dari gerak pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Jika pendapatan

per kapita meningkat maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan menurun.

Dari hasil penelitian pada Tabel 7 pendapatan per kapita Daerah Inti adalah Rp 3.066.533,08 paling tinggi dibanding DOB (Rp 2.458.886,20) dan Daerah Mekar (Rp 2.701.944,95). Hasil penelitian ini senada dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Darmawan dkk (2008). Kondisi yang demikian dapat dijelaskan karena Daerah Induk memiliki potensi sumber daya yang lebih siap, baik pemerintahan, masyarakat maupun infrastrukturnya. Hal ini juga mempercepat pembangunan di Daerah Induk, karena setelah pemekaran wilayah jumlah penduduk lebih sedikit (246.126 jiwa) dibanding sebelum pemekaran wilayah (390.606 jiwa) sementara setelah pemekaran wilayah kualitas sumberdaya ekonomi lebih baik dan lebih mapan.

Tabel 7. Rata-rata PDRB per kapita Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun 2004 sampai 2011

Tahun	Rerata PDRB per Kapita (Rp)		
	Daerah Inti	DOB	Daerah Mekar
2004	1.485.616,32	2.110.417,84	1.860.497,23
2005	2.965.360,57	2.277.497,60	2.552.642,79
2006	3.210.056,95	2.386.097,85	2.715.681,49
2007	3.290.558,22	2.414.326,36	2.764.819,10
2008	2.896.172,31	2.474.395,00	2.643.105,92
2009	3.396.948,14	2.529.945,18	2.876.746,36
2010	3.559.316,30	2.696.762,72	3.041.784,15
2011	3.728.235,80	2.781.647,08	3.160.282,57
Rerata	3.066.533,08	2.458.886,20	2.701.944,95

Sumber : Data Diolah, 2013.

Angka Kemiskinan

Indikator kesejahteraan PDRB per kapita dihubungkan dengan indikator angka kemiskinan. Dari Tabel 8 diketahui bahwa Daerah Inti memiliki angka kemiskinan rata-rata terendah yakni 25,54%, sementara DOB memiliki angka kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 26,64%. Peningkatan pendapatan per kapita di Daerah Inti, DOB maupun Daerah Mekar diiringi oleh penurunan jumlah penduduk miskin di daerah-daerah tersebut (Gambar 2).

Grafik pada Gambar 2 menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan PDRB per kapita, angka kemiskinan pun menurun. Pada awal mula pemekaran wilayah dilakukan, angka kemiskinan paling tinggi terjadi di DOB. Penyebabnya adalah antara lain bahwa DOB merupakan daerah pinggiran atau plasma bagi Daerah Inti. DOB masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Menurut Ikhsan (2001) dalam Darmawan dkk (2008)

umumnya sektor pertanian menyumbang kemiskinan cukup tinggi. Penyebab lain adalah terbatasnya infrastruktur penunjang seperti fasilitas pendidikan, ekonomi maupun fasilitas lain dimana umumnya DOB berada jauh dari ibukota kabupaten. Selanjutnya Darmawan dkk (2008) menambahkan bahwa ketertinggalan DOB juga disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan manusia yang tersedia serta kurang maksimalnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui investasi publik.

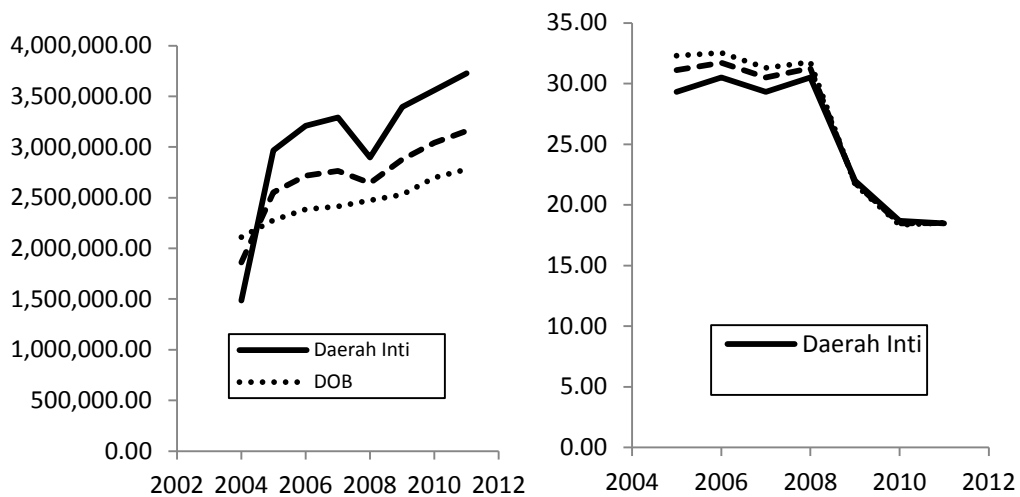
Tabel 8. Rata-rata Angka Kemiskinan Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun 2005 - 2011

Tahun	Rerata Angka Kemiskinan (%)		
	Daerah Inti	DOB	Daerah Mekar
2005	29,32	32,30	31,10
2006	30,51	32,54	31,73
2007	29,32	31,29	30,50
2008	30,51	31,78	31,27
2009	21,98	21,69	21,81
2010	18,69	18,35	18,48
2011	18,48	18,53	18,51
Rata-rata	25,54	26,64	26,20

Sumber : Data Diolah, 2013.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 angka kemiskinan di Daerah nti, DOB dan Daerah Mekar cenderung menurun ke angka kemiskinan yang relatif hampir sama besarnya menjadi sekitar 18%. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis pada tahun 2009 setelah menurun pada tahun 2008 karena krisis ekonomi (Gambar 1) dan peningkatan pendapatan per kapita (Gambar 2).

Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2009 di semua daerah kemungkinan juga disebabkan oleh keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya di Kabupaten Bengkulu Utara penurunan jumlah masyarakat miskin merupakan dampak dari terciptanya lebih banyak lapangan kerja akibat dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2.
Perkembangan Rata-rata PDRB per Kapita (dalam Rupiah) (Kiri)
dan Angka Kemiskinan (dalam %) (Kanan)

Menurut Anonim (2008) pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 22,3 triliun untuk pembiayaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan Keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi. Juga di bidang pertanian, kelautan, perikanan, sarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan serta perdagangan. Begitu pula dengan program penanggulangan kemiskinan yang langsung untuk rumahtangga miskin dan sangat miskin maupun program pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji beda rata-rata kinerja ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah menunjukkan bahwa : a) untuk indikator pertumbuhan ekonomi, tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah, b) untuk indikator PDRB per kapita, berbeda nyata, dimana PDRB per kapita setelah pemekaran wilayah lebih tinggi dibanding sebelum pemekaran, dan c) untuk indikator angka

kemiskinan, tidak ada perbedaan antara sebelum dengan setelah pemekaran wilayah.

2. Hasil analisis kinerja ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar pesisir di Provinsi Bengkulu setelah pemekaran menunjukkan bahwa a) pertumbuhan ekonomi Daerah Inti paling tinggi dan relatif stabil sedang pertumbuhan ekonomi DOB paling rendah dan cenderung fluktuatif, b) PDRB per kapita tertinggi terjadi di Daerah Inti dan yang terendah di DOB, dan c) angka kemiskinan paling rendah terdapat di Daerah Inti dan yang tertinggi di DOB.

Saran

Dengan demikian dapat diajukan saran atau masukan bagi penentu kebijakan yakni :

1. Perlu dilakukan pembagian sumberdaya alam, manusia, infrastruktur penunjang antara Daerah Inti dan DOB agar daerah-daerah tersebut berkembang seimbang sehingga dampak pemekaran yang diidamkan berupa pemerataan kesejahteraan dapat diwujudkan.
2. Perlu diupayakan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk daerah pesisir yang umumnya bermata pencahariaan sebagai nelayan antara lain melalui peningkatan pengetahuan, penguasaan teknologi dan akses permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Arafat. 2011. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat)*. Thesis Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan perdesaan Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id>. Diakses Tanggal 15 Nopember 2013 Pukul 19.10 WIB.
- Ajdaoke. 2012. *Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. <http://ajdaoke.wordpress.com>. Diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pukul 20.12 WIB.
- Adm. Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara. 2011. *Perkembangan Ekonomi Daerah*. <http://www.investasi.bengkuluutarakab.go.id>. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 20.22 WIB.
- Ani. 2009. *Penduduk Miskin Tersebar di Kawasan Pesisir*. <http://bisniskeuangan.kompas.com>. Diakses Tanggal 15 Nopember 2013 Pukul 10.32 WIB.
- Anonim. 2008. *Menyimak Penurunan Angka Kemiskinan*. <http://PNPM-mandiri.org>. Diakses Tanggal 14 Nopember 2013 Pukul 21.19 WIB.

- _____. 2009. Pemekaran Daerah di Indonesia. <http://id.wikipedia.org>. Diakses Tanggal 13 Maret 2013 Pukul 10.13 WIB.
- BPS Provinsi Bengkulu. 2013. *PDRB Provinsi Bengkulu menurut Penggunaan 2012*. <http://bengkulu.bps.go.id>. Diunduh Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 13.28 WIB.
- Darmawan, Nazara, S., Jackson, D., Ahmad, T., Purwanto, D.A. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP)*. <http://undp.or.id>. Diakses Tanggal 4 April 2013 Pukul 10.34 WIB.
- Handoko, R. 2008. *Problem Kesenjangan Antar Daerah di Era Otonomi*. <http://wikimu.com>. Diakses tanggal 30 Maret 2013 Pukul 15.49 WIB.
- Indonesian Investment Coordinating Board. 2012a. *Display Ekonomi PDRB Kabupaten Muko-Muko*. <http://regionalinvestment.bkpm.go.id>. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 21.30 WIB.
- _____. 2012b. *Display Ekonomi PDRB Kabupaten Seluma*. <http://regionalinvestment.bkpm.go.id>. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 22.11 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Data Pokok APBN 2005-2011*. <http://www.anggaran.depkeu.go.id>. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 13.21 WIB.
- Khalid, T. M. 2012. *Otonomi Daerah: Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah*. <http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>. Diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pukul 20.30 WIB.
- Noviansa, Revi. 2013. *Sektor Pendapatan Regional, Kategori Potens Daerah*. <http://kp2tprovbengkulu.info>. Diakses Tanggal 15 Nopember 2013 Pukul 09.15 WIB.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015*. <http://bengkulu.bpk.go.id>. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 20.50 WIB.
- Tambunan, T. 2003. *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 412 halaman.
- Widodo, T. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 322 halaman.
- Witrianto. 2013. *Profil Provinsi Bengkulu, Sejarah Pemerintahan*. <http://bengkuluprov.go.id>. Diakses Tanggal 3 April 2013 Pukul 18.16 WIB.